

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila, terdapat dalam Undang-undang no. 2 tahun 1989, mempunyai tujuan sebagai berikut:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (UU RI no. 2 tahun 1989, pasal 4).

Arah tujuan pendidikan nasional tersebut memberikan petunjuk nyata bagi peran pendidikan umum dalam kawasan pendidikan nasional kita, karena

pendidikan umum di Perguruan Tinggi bertujuan mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan masyarakat, mereka dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang bahagia, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan falsafah Pancasila. (Hamdan Mansoer, 1983: 8).

Untuk mencapai tujuan pendidikan umum tersebut, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman sosial secara terorganisasi dalam proses belajarnya, yang menunjang perluasan cakrawala perhatian dan pengetahuannya, sehingga ia tidak terpaku pada batas bidang pengetahuan keahlian yang dipelajari saja. Dengan

bekal pemahaman tentang agama, Pancasila, kewiraan dan pengetahuan yang menyangkut sosial, kebudayaan serta pengenalan terhadap masalah lingkungan kehidupan manusia, diharapkan mahasiswa kelak mampu menemukan kepribadiannya dan dapat menempatkan dirinya dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat.

Dengan melihat uraian di atas, pada hakikatnya kedudukan Pancasila dalam khazanah Pendidikan Nasional Indonesia mempunyai arti luas dan sempit. Dalam artinya yang luas terlihat dalam sistem Pendidikan Pancasila, sedangkan dalam arti yang sempit, yakni Pendidikan Pancasila sebagai studi khusus yang diajarkan sejak mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Arah sasaran dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian Pendidikan Pancasila dalam artinya yang sempit dan lebih khusus lagi pada mata kuliah Filsafat Pancasila.

Mata kuliah Filsafat Pancasila (di IKIP Yogyakarta) merupakan salah satu dari MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum).

Mata Kuliah Dasar Umum merupakan komponen dalam kurikulum pendidikan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan profesional lulusan pendidikan tinggi, yang merupakan persiapan bagi mahasiswa dalam memasuki kehidupan masyarakat. (Surat Kep. Dirjen Dikti. Depdikbud no. 32/DJ/Kep/1983: iv).

Dengan demikian MKDU merupakan komponen pendidikan di Perguruan Tinggi yang berupaya bagi pembinaan kepribadian seorang warga negara sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Faridah (1992: 156-157) dalam tesisnya yang berbunyi:

MKDU adalah program pendidikan di pendidikan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan kompetensi seorang lulusan pendidikan tinggi dalam rangka membina warga negara sarjana Indonesia menjadi manusia Indonesia seutuhnya melalui pembinaan nilai-nilai dan semangat menerapkan nilai-nilai.

Pada halaman berikutnya, Faridah menyatakan bahwa "pendidikan umum di perguruan tinggi dikembangkan melalui MKDU. Dan MKDU merupakan sarana pengembangan pendidikan umum di perguruan tinggi".

Dengan demikian jika dirunut dari uraian di atas dapat dikemukakan sebagai berikut: perkuliahan Filsafat Pancasila (di IKIP Yogyakarta) merupakan salah satu komponen dari MKDU dan MKDU merupakan sarana pengembangan pendidikan umum di Perguruan Tinggi.

Perkuliahan Filsafat Pancasila itu sendiri belum tentu diadakan di setiap Perguruan Tinggi. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa Filsafat Pancasila perlu diajarkan di IKIP, di lain pihak ada yang menolak, dengan alasan sudah ada penataran P4. Salah satu hal yang menarik tentang perdebatan tersebut adalah tidak satupun

pendapat tersebut disertai penelitian yang cermat. Studi ini berusaha untuk meneliti alasan-alasan diadakannya kuliah filsafat Pancasila dan meneliti bagaimana upaya yang dilakukan dosen dalam rangka mencapai tujuan pendidikan umum melalui kuliah Filsafat Pancasila.

Pentingnya kita pelajari secara mendalam tentang Pancasila, karena di dalamnya terkandung pokok-pokok tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mendalami telaahan Pancasila, kita perlu mengetahui tentang masalah yang menjadi inti dari tiap-tiap sila yang ada dalam Pancasila. Sesuai dengan cara berpikir yang beraturan dalam filsafat itu sendiri (logika), maka perlu pengkajian tiap-tiap sila dengan menguraikan secara filsafati, sehingga dengan demikian diharapkan kita sampai pada pengertian yang substansial tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan berpikir sistematis tersebut kita akan sampai pada pilihan nilai-nilai yang mendasar atau yang *hakikat* dari Pancasila itu.

B. Fokus Penelitian

Menurut hasil penelitian Bunyamin Maftuh (1990: 184) kriteria pendidikan umum adalah:

1. Program pendidikan umum diarahkan untuk membina siswa menjadi warga negara Indonesia yang baik,

- yang berkepribadian seutuhnya,
2. Program pendidikan umum diberikan kepada setiap siswa.
 3. Program pendidikan umum memberikan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan yang bersifat umum, yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia, dan
 4. Program pendidikan umum bukan program yang diarahkan untuk membina siswa menjadi seorang ahli atau spesialis, baik dibidang akademis maupun vokasional.

Kriteria tersebut dirumuskan oleh Bunyamin Maftuh untuk mengukur suatu mata pelajaran atau mata kuliah sebagai pendidikan umum atau tidak.

TR. McConnel mengatakan bahwa: "pendidikan umum di samping memperhatikan perkembangan intelektual, juga memperhatikan perkembangan emosi, sosial, dan moral secara integrasi". (Nelson B. Henry, 1952: 11). Dengan demikian tujuan utama dari pendidikan umum adalah mengembangkan kepribadian yang utuh, bukan semata-mata pada perkembangan intelektualnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut penelitian ini berusaha untuk mengetahui alasan-alasan diadakan kuliah Filsafat Pancasila, untuk mengetahui karakteristik proses belajar mengajar Filsafat Pancasila dan juga untuk menemukan upaya yang dilakukan dosen untuk mencapai tujuan tersebut, yakni manusia Indonesia seutuhnya. "Manusia utuh bukan hanya cerdas (memiliki ilmu yang

banyak), akan tetapi juga memiliki moral yang baik, yang tercermin pada prilakunya sehari-hari, dan memiliki keahlian serta ketrampilan", (Amsal Amri, 1994: 151). Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah karakteristik perkuliahan Filsafat Pancasila dan alasan-alasan diadakannya kuliah Filsafat Pancasila serta upaya yang dilakukan dosen Filsafat Pancasila dalam membina mahasiswa, untuk mencapai tujuan Pendidikan Umum.

C. Rumusan Masalah

Tolok ukur utama menganalisis proses belajar mengajar Filsafat Pancasila adalah situasi pedagogis dan pendekatan obyektif-praktis secara seimbang. Situasi pedagogis adalah situasi pendidikan yang memperlakukan peserta didik sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Tidak kita pungkiri bahwa peserta didik adalah pihak yang dikenai pendidikan. Namun peserta didik bukan "obyek" pendidikan semata.

Obyek pendidikan tersebut bersifat aktif dan kreatif, sehingga reaksi terhadap tindakan yang ditujukan kepadanya, tidak semata-mata tergantung kepada tindakan itu sendiri, melainkan tergantung dari makna yang diberikan peserta didik kepada tindakan tersebut. (M.I. Soelaeman, 1985: 53).

Lebih lanjut, Sanusi (1989: 46), mengatakan:

Pendidikan adalah proses pendewasaan diri sesuai

dengan potensi, bakat, minat, motif, aspirasi, dan kepercayaan peserta didik sendiri. Karena itu, sudah selayaknya bila proses belajar mengajar disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik.

Asumsi tersebut menuntut adanya situasi pendidikan yang mengandung unsur kebebasan peserta didik untuk menyatakan dirinya sendiri. Di samping itu, kriteria lain agar terjadi situasi pedagogis dalam suatu proses belajar mengajar, seperti yang disampaikan oleh Bapak M.I. Soelaeman dan Bapak Achmad Sanusi antara lain: peserta didik diperlakukan sebagai subyek, peserta didik bersifat aktif dan kreatif, ada pertautan makna antara pendidik dan peserta didik, sesuai dengan sifat peserta didik (potensi, minat) dan partisipasi peserta didik. Walaupun begitu, pendidik memelihara agar kebebasan tidak menyimpang dari kebenaran. Sesuai dengan Filsafat Pancasila, pendidik berperan mengarahkan siswa kepada kebebasan nilai-nilai obyektif Pancasila.

Dengan demikian, proses belajar mengajar yang mengandung situasi pedagogis itu ditandai oleh adanya situasi penghormatan terhadap peserta didik sebagai manusia. Interaksi yang terjadi adalah interaksi yang terbuka dan manusiawi. "Interaksi yang manusiawi itu akan memelihara rasa aman, menghindari konflik dan frustrasi pada diri peserta didik". (Rochman Natawidjaja,

1991: 6). "Peserta didik yang merasa jiwanya tertekan, yang selalu dalam keadaan takut akan kegagalan, yang mengalami kegoncangan emosi, tidak dapat belajar efektif". (S. Nasution, 1982: 54). A. Kosasih Djahiri (1985: 33-34) mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, harus ada pendekatan *humanistik*: suatu pola berpikir dan pola kerja yang meminta agar kita :

- a. menghargai siswa sebagai manusia yang potensial.
Catatan: Fahaman Pendidikan sekarang cenderung menyatakan bahwa "tidak ada anak yang bodoh", setiap siswa akan mampu belajar dan berhasil asal diberikan kesempatan dan waktu serta cara sesuai dengan kemampuannya.
- b. menghargai/melayani siswa secara: jujur/fair, obyektif, hangat, terbuka dan bebas tanpa paksaan.
- c. menciptakan suasana kelas yang: akrab/kekeluargaan, bebas bagi perasaan anak untuk tanpa ragu mengekspresikan emosi dan pendapatnya sehingga ada keterbukaan dan kesiapan/kemauan untuk belajar (bacanya: kesiapan menerima/mengkaji sesuatu).

Dalam paragraf tersebut tertulis "tidak anak yang bodoh", ini tidak lepas dengan konsep "belajar tuntas" (mastery learning). Hal ini tentunya tidak ditujukan kepada semua "anak secara umum", sebab tidak kita pungkiri bahwa disekitar kita, ada anak yang tingkat kepandaiannya jauh berbeda dengan anak normal (misal: anak ediot, debil dan sebagainya). Namun jika hal ini ditujukan kepada mahasiswa, peneliti tidak keberatan, karena untuk menjadi mahasiswa mereka telah "lulus test",

dengan predikat kepandaian tingkat tertentu.

Perkuliahan Filsafat Pancasila menggunakan pendekatan obyektif-praktis. Artinya, dalam perkuliahan Filsafat Pancasila, pendidik menghubungkan nilai-nilai Pancasila yang ideal dengan realitas kehidupan masyarakat. Pengungkapan realitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat merupakan tuntutan yang sama pentingnya dengan pengungkapan nilai-nilai Pancasila yang ideal. Pendekatan ini akan membawa implikasi terhadap tujuan, metode, materi dan penilaian.

Tujuan perkuliahan Filsafat Pancasila adalah membina mahasiswa agar menjadi manusia yang utuh dan berkepribadian Pancasila. Artinya, perkuliahan Filsafat Pancasila hendak mengembangkan pengertian yang benar tentang Pancasila, menghayatinya, dan mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan". (Acmad Charis Zubair, 1981: 70).

Dengan mempelajari Filsafat Pancasila, mahasiswa diharapkan menjadi manusia yang utuh, dan dalam kehidupannya sehari-hari berlandaskan pada Pancasila. Manusia utuh bukan hanya cerdas, akan tetapi juga memiliki moral yang baik, yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, memiliki keahlian dan ketrampilan.

Tujuan tersebut senada dengan tujuan pendidikan umum, yakni:

... membina kepribadian manusia seutuhnya, yakni mencakup dia sebagai individu yang memuaskan, anggota keluarga yang bahagia, warga masyarakat yang

produktif, warga negara yang bertanggung jawab, dan hamba Tuhan yang taat. (Faridah, 1992: 112).

Dirjen Dikti melalui keputusannya no. 32/DJ/Kep/1983, menyatakan bahwa tujuan pendidikan umum:

Untuk mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan masyarakat, mereka dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa tujuan perkuliahan Filsafat Pancasila dan tujuan pendidikan umum mengacu pada pembinaan kepribadian mahasiswa menuju manusia seutuhnya. Konsep manusia (Indonesia) seutuhnya tercermin, dalam Undang-undang RI no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 (lihat hal. 1, Bab I). Untuk mencapai manusia seutuhnya, tentunya tidak hanya dengan kuliah Filsafat Pancasila, namun masih ada mata kuliah lain yang mendukungnya.

Perkuliahan Filsafat Pancasila itu sendiri termasuk dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila. Dengan demikian Pendidikan Pancasila meliputi perkuliahan Filsafat Pancasila dan mata kuliah lain tentang Pancasila. (misal Pengantar Pancasila, P4).

Metode yang ideal dalam perkuliahan Filsafat Pancasila adalah metode yang mampu mengaktifkan peserta didik untuk berpikir, merasakan, dan mengamalkan

Pancasila. Tidak ada satu metode yang tepat untuk mencapai semua tujuan tersebut. Oleh karena itu perlu penggabungan berbagai metode yang memungkinkan siswa berpikir, merasakan, dan mengamalkan Pancasila.

Materi perkuliahan Filsafat Pancasila dikaitkan dengan kasus nyata yang ada dalam masyarakat. Mahasiswa diminta untuk menghubungkan kasus tersebut dengan nilai-nilai Pancasila yang ideal.

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam perkuliahan Filsafat Pancasila bukan hanya aspek kognisi, tetapi juga penghayatan dan keyakinan (afeksi) dan pengamalan (psikomotor) peserta didik terhadap Pancasila secara benar. Untuk itu diperlukan alat-alat penilaian yang beraneka macam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik proses belajar mengajar Filsafat Pancasila ?
2. Bagaimanakah situasi perkuliahan Filsafat Pancasila, jika ditinjau dari sudut Pendidikan Umum ?
3. Bagaimanakah pendapat mahasiswa tentang perkuliahan Filsafat Pancasila, sebagai salah satu mata kuliah Pendidikan Umum ?

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dosen Filsafat Pancasila dalam mengarahkan mahasiswa mencapai tujuan Pendidikan Umum ?

D. Relevansi Masalah dengan Pendidikan Umum

Tesis ini dikerjakan untuk memenuhi tugas akhir studi strata dua program studi Pendidikan Umum. Karena itu, sudah sewajarnya jika masalah tesis ini tidak keluar dari konteks pendidikan umum.

Ada tiga alasan tesis ini masuk dalam ruang lingkup Pendidikan Umum.

Pertama, ditinjau dari sudut tujuan yang hendak dicapai, Soerjanto Poespowardojo (1991: 56) mengatakan:

Tujuan mempelajari Filsafat Pancasila, bukan hanya dalam arti yang sektoral, salah satu aspek kehidupan, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia.

Lebih lanjut beliau mengatakan:

... bukan hanya membentuk manusia untuk memiliki kecerdasan intelektual atau ketrampilan kerja saja, tetapi dalam arti yang menyeluruh, ialah menjadi manusia/warga negara yang total, yang pada umumnya disebut manusia baik sebagai *manusia*, sehingga kebaikan total itu terwujud dalam manusia yang berbudi luhur, dewasa dalam tindakannya, mempunyai keseimbangan hidup dalam menghadapi masalah-masalah, bebas bertanggung jawab, atas segala perilakunya, tenang dalam hidup lahir dan batinnya. (Soerjanto Poespowardojo, 1991: 57).

Dengan demikian perkuliahan Filsafat Pancasila bertujuan (lihat juga pendapat A.C. Zubair hal. 8) mengembangkan pribadi mahasiswa yang Pancasila-lais. Perkuliahan Filsafat Pancasila dalam konteks pendidikan umum, diadakan bukan dimaksudkan terutama pada bidang keahlian mengenai Filsafat Pancasila, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kepribadian yang utuh.

Dengan demikian perkuliahan Filsafat Pancasila hendak mengembangkan kepribadian Pancasila yang utuh, bukan sekedar mengerti Pancasila secara benar, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan secara konsisten. Jika tujuan perkuliahan Filsafat Pancasila hanya sekedar mengerti Pancasila secara benar tentu sulit untuk memasukkan perkuliahan Filsafat Pancasila sebagai program pendidikan umum. Seperti pendapat T.R. McConnel yang mengatakan bahwa "... general education takes as its responsibility the development of individual on a broader scale - emotional, social, and moral, as well as intellectual - and in an integrated way". (Nelson B. Henry, 1952: 11), yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: pendidikan umum di samping memperhatikan perkembangan intelektual, juga memperhatikan perkembangan emosi, sosial, dan moral secara terintegrasi. Jadi tujuan

pendidikan umum adalah mengembangkan kepribadian yang utuh. Tujuan perkuliahan Filsafat Pancasila sejalan dengan pendidikan umum tersebut.

Kedua ditinjau dari sudut materi, perkuliahan Filsafat Pancasila merupakan pendidikan moral dan pendidikan politik. Sebagai pendidikan moral, perkuliahan Filsafat Pancasila bertolak dari peranan Pancasila sebagai filsafat hidup yang merupakan sumber nilai. Nilai-nilai, norma yang mengikat manusia Indonesia tersebut, berpedoman pada:

1. Moral Ketuhanan, dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Moral Kemanusiaan, dari sila Kemanusiaan yang adil beradab.
3. Moral Persatuan, dari sila Persatuan Indonesia.
4. Moral Kerakyatan, dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Moral Keadilan, dari sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sunoto, 1985: 3)

Sebagai pendidikan politik, perkuliahan Filsafat Pancasila bertolak dari peranan Pancasila sebagai landasan dan filsafat negara. Hal senada diungkapkan oleh Rochman Natawidjaja bahwa:

Pendidikan Pancasila perlu ditinjau dari dua sisi yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai pendidikan pribadi (moral dan sosial) dan sebagai pendidikan politik. (Rochman Natawidjaja, 1991: 2).

Pendidikan moral dan pendidikan politik merupakan

komponen pokok pendidikan umum. Philip H. Phenix mengemukakan enam kompetensi dasar yang hendak dikembangkan dalam pendidikan umum dalam rangka mengembangkan pribadi yang utuh. Keenam kompetensi tersebut berkaitan dengan enam klasifikasi makna, yaitu: simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan sinoptik. Etik meliputi bidang moral dan pertimbangan etik, sedangkan sinoptik meliputi sejarah, agama, dan filsafat. Dengan demikian perkuliahan Filsafat Pancasila mengandung unsur etik dan filsafat, yang dapat dimasukkan dalam klasifikasi makna etik dan sinoptik.

Ketiga, ditinjau dari proses belajar mengajar di IKIP Yogyakarta, perkuliahan Filsafat Pancasila merupakan bagian dari perkuliahan Pendidikan Pancasila, dan mata kuliah Pendidikan Pancasila tersebut merupakan komponen MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum).

MKDU merupakan program pendidikan yang sengaja diselenggarakan sebagai upaya pembinaan nilai-nilai bagi mahasiswa dalam rangka pengembangan kepribadian secara utuh, maka dapat dikemukakan bahwa adanya program MKDU sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan umum. Dengan kata lain, bahwa pendidikan umum di perguruan tinggi dikembangkan melalui MKDU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; MKDU merupakan suatu sarana pengembangan program pendidikan umum di perguruan tinggi. (Faridah, 1992: 157).

diadakannya kuliah Filsafat Pancasila di IKIP Yogyakarta.

2. Upaya dosen Filsafat Pancasila dalam rangka mencapai tujuan pendidikan umum di IKIP Yogyakarta.
3. Beberapa metode yang diterapkan dalam pembelajaran Filsafat Pancasila.
4. Beberapa alat penilaian yang dipakai untuk mengukur hasil belajar Filsafat Pancasila.
5. Apakah perkuliahan Filsafat Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pendidikan umum.

F. Pentingnya Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik bagi pengembangan metode penyampaian, alat penilaian, maupun situasi pedagogis dalam perkuliahan Filsafat Pancasila.

Secara lebih rinci, pentingnya penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan mengungkapkan metode penyampaian perkuliahan Filsafat Pancasila dalam kaitannya dengan suasana dialogis dalam perkuliahan.
2. Prosedur penilaian terhadap hasil test mahasiswa dalam kaitannya dengan ranah kognitif, afektif dan

psikomotor, yakni apakah ada keseimbangan penilaian di antara ranah tersebut.

3. Penelitian tentang perkuliahan Filsafat Pancasila di Indonesia belum banyak dilaksanakan, sehingga hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan perkuliahan Filsafat Pancasila.

G. Definisi Operasional Judul

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah "karakteristik", kadang-kadang diartikan sebagai *sifat-sifat*, kadang-kadang diartikan sebagai *ciri khas*. Pengertian sifat-sifat dan ciri khas itu sendiri, sebenarnya banyak mengandung persamaan. Dalam penelitian ini, karakteristik dimaksudkan sebagai ciri khas, yakni ciri khas dalam perkuliahan Filsafat Pancasila di IKIP Yogyakarta yang berkaitan dengan metode penyampaian, alat penilaian yang digunakan, dan situasi pedagogis dalam perkuliahan Filsafat Pancasila. Metode penyampaian perkuliahan dapat dilaksanakan dengan tatap muka, dapat pula menggunakan alat bantu CCTV. Alat penilaian

dapat berbentuk essay dan multiple choice. Situasi pedagogis menurut MI. Soelaeman dan Achmad Sanusi, mempunyai kriteria sebagai berikut: peserta didik diperlakukan sebagai subyek, peserta didik bersifat aktif dan kreatif, ada pertautan makna antara pendidik dan peserta didik, sesuai dengan sifat peserta didik (potensi, minat) dan partisipasi peserta didik.

2. Penggunaan istilah *filsafat*, mempunyai arti bermacam-macam. Dalam bahasa Arab padanan kata filsafat adalah *falsafah* dan dalam bahasa Inggris: *philosophy*. Pengertian filsafat diartikan dan dipakai secara berlaianan oleh para filsuf, maupun orang yang tertarik pada filsafat. Sesuai dengan latar belakangnya masing-masing, setiap filsuf meninjau filsafat dari titik tolak dan sudut pandang yang berbeda satu dengan lainnya. Menurut pendapat Harold H. Titus (1979) yang diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi (1984) dalam buku *Persoalan-persoalan Filsafat*, pengertian filsafat dapat diartikan sebagai berikut:
(1) filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan tertentu, (2) filsafat adalah suatu sikap kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Ini merupakan sikap

terbuka, toleransi terhadap pendapat orang lain. Hal ini berkaitan bahwa ahli filsafat selalu bersifat kritis. (3) filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Filsafat mengadakan penyelidikan sampai pada masalah-masalah yang terdalam yang mendasari suatu hal. (disarikan dari H.M. Rasjidi, 1984: 11-15). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat bertalian dengan kegiatan pemikiran manusia yang bersifat kritis dan menyeluruh.

Dengan digunakannya istilah Filsafat Pancasila, dalam penelitian ini diartikan sebagai pembahasan Pancasila secara filsafati, yaitu "pembahasan Pancasila sampai pada hakikatnya yang terdalam (sampai pada inti yang terdalam)", (Kaelan, 1991: 38).

... pengertian filsafat Pancasila merupakan suatu pengetahuan yang terdalam yang merupakan hakikat Pancasila yang bersifat essensial, abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. (Notonagoro, 1966: 34).

3. Penggunaan istilah pendidikan umum sering digunakan dalam kerangka pendidikan di Indonesia. Namun yang dimaksud pendidikan umum oleh satu pihak belum tentu sama dengan yang dimaksud oleh pihak lain. Pendidikan

umum diartikan sebagai pendidikan yang berlaku umum bagi semua peserta didik yang tidak bersifat khusus dan diarahkan untuk pengembangan kepribadian peserta didik secara keseluruhan (utuh).

Pendidikan umum adalah program pendidikan yang membina kepribadian warga negara peserta didik menjadi manusia seutuhnya melalui pembinaan nilai-nilai dan semangat menerapkan nilai-nilai untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. (Faridah, 1992:155).

Pendidikan umum yang dimaksud dalam penelitian ini, pendidikan umum di Indonesia yang bertujuan untuk membina kepribadian warga negara peserta didik menjadi manusia seutuhnya melalui pembinaan nilai-nilai dan semangat menerapkan nilai-nilai untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan umum di Indonesia berupaya membina kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. (Menurut Gordon Allport, "Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas". Dikutip dari buku *Teori-teori Kepribadian*, karangan E. Koswara, 1991: 11).

Secara operasional, penelitian ini akan menganalisis situasi perkuliahan Filsafat Pancasila di IKIP Yogyakarta, berkaitan dengan metode penyampaian,

situasi pedagogis, alat penilaian, materi perkuliahan ditinjau dari pendidikan umum, yakni apakah perkuliahan Filsafat Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pendidikan umum.

H. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan suatu titik tolak pemikiran, yang digunakan sebagai dasar penelitian, yang dibutuhkan untuk menyelidiki masalah-masalah yang akan dijawab. Penelitian ini mendasarkan pada asumsi sbb:

1. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang monopluralis.

Hakikat manusia yang monopluralistik berarti eksistensi manusia bersusun, majemuk, sarwa tunggal, bertubuh jiwa, berakal - rasa - kehendak, bersifat perseorangan dan makhluk sosial, dan kedudukan berdiri sendiri dan makhluk Tuhan (Notonagoro, 1982: 49).

Secara lebih rinci, hakikat manusia terdiri dari susunan kodrat jiwa dan tubuh, sifat kodrat sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan.

"Aspek jiwa manusia tersusun atas akal, rasa dan kehendak. Sedangkan aspek tubuh manusia tersusun atas unsur binatang, unsur tumbuhan, dan unsur benda

mati", (Sunoto, 1985: 63).

2. Pendidikan nasional pada dasarnya adalah proses pembangunan keseluruhan potensi dan aspek kepribadian manusia. Dalam rangka pembangunan keseluruhan potensi dan aspek kepribadian manusia, keberadaan pendidikan umum sangat penting, khususnya di Perguruan Tinggi karena mahasiswa mempunyai latar belakang bidang keahlian masing-masing, dan di pihak lain semua dituntut memiliki kepribadian utuh. Untuk memiliki kepribadian utuh, seseorang tidak hanya belajar tentang keahlian, tetapi belajar pendidikan umum.
3. Para dosen Filsafat Pancasila, mempunyai pandangan-pandangan yang tertentu tentang berbagai persoalan filsafat Pancasila secara konseptual teoritis yang dapat dijadikan rujukan dalam memilih alternatif kebijakan pendidikan yang berkenaan dengan mata kuliah Filsafat Pancasila.
4. Perkuliahan Filsafat Pancasila akan berjalan dengan baik, jika dilaksanakan dengan:
 - a. metode penyampaian dalam proses belajar mengajar Filsafat Pancasila, tidak menggunakan alat bantu CCTV, sehingga terjadi situasi dialogis dalam perkuliahan.

- b. dalam sistem tutorial ada *pertautan makna* antara pembimbing dengan mahasiswa (yang dibimbing).
- c. alat penilaian yang berbentuk essay dan multiple choice, mengungkapkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang serta mahasiswa diajak untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

